

**PERANAN DANA BANTUAN SOSIAL TERHADAP KUALITAS RUMAH
MASYARAKAT MISKIN MELALUI PROGRAM BEDAH RUMAH
DI KABUPATEN BULELENG**

**Asta Lugra Pramita¹
I Gusti Wayan Murjana Yasa²
A.A.I.N Marhaeni³**

¹Program Magister Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana

^{2,3}Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Udayana

Email : ie_pps.unud@yahoo.co.id

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah 1) untuk menganalisis persepsi masyarakat penerima bantuan bedah rumah tentang keberadaan program ini, 2) untuk mengetahui ada tidaknya peningkatan kualitas rumah masyarakat miskin sebelum dan sesudah menerima bantuan program bedah rumah, 3) untuk mengetahui kendala-kendala apa saja yang dihadapi Pemerintah dalam pelaksanaan program bedah rumah, 4) untuk mengetahui upaya yang dilakukan untuk mengatasi kelemahan-kelemahan yang dihadapi dalam program bedah rumah di Kabupaten Buleleng. Hasil penelitian yang diperoleh adalah 1) persepsi masyarakat miskin penerima bantuan terhadap keberadaan program bedah rumah sebagian besar memberikan pernyataan positif (Setuju dan Sangat Setuju), sisanya memberikan pernyataan netral, dan pernyataan negatif (Sangat Tidak Setuju dan Tidak Setuju). 2) Terdapat peningkatan kualitas rumah masyarakat miskin setelah menerima bantuan bedah rumah. 3) Kendala-kendala yang dihadapi pemerintah daerah dalam pelaksanaan program bedah rumah adalah verifikasi, penjangkangan, sosialisasi, dan pembangunan. 4) Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi kelemahan-kelemahan yang dihadapi pemerintah dalam pelaksanaan program bedah rumah adalah menyiapkan konsultan pendamping, menyerahkan pelaku utama dalam program bedah rumah kepada masyarakat desa/kelurahan, dan perlu disusun standar baku dari calon penerima bantuan.

Kata Kunci : Program bedah rumah, kualitas rumah, penduduk miskin, Kendala-kendala

ABSTRACT

The aims of this study are 1) to analyze the perceptions of beneficiaries of house surgeon about the existence of this program, 2) to know whether there is an increase in the quality of the house of the poor community before and after receiving assistance of surgical program, 3) to determine what constraints faced by the Government in the implementation of surgical programs, 4) to determine the efforts made to overcome the shortcomings encountered in the surgical program in Buleleng. The data used were primary data and secondary data. The results obtain are 1) the perception of poor beneficiaries of the existence of the house most of the surgical program provides a positive statement (Agree and Strongly Agree), the rest gave a statement neutral, and negative statements (Strongly Disagree and Disagree). 2) The H_0 is rejected. This means that there is an increase in the quality of the house of the poor community after receiving surgical assistance. 3) The constraints faced in the implementation of the surgical program are verification, exploration, socialization, and development. 4) Efforts being made to overcome the disadvantages faced by the government in the implementation of the program are to prepare a consultant surgical assistant, handing the main actors in the home surgery program to the village community, and there is a need to develop standard conditions of prospective beneficiaries.

Keywords: surgical program, quality of the house, the poor, constraints

PENDAHULUAN

Kemiskinan adalah masalah sosial terbesar di dunia dan setiap negara berusaha untuk mengatasinya. Kemiskinan adalah faktor yang sangat menentukan maju tidaknya suatu negara. Menurut Adam Smith (1776) tidak terdapat masyarakat yang berkembang dan berbahagia jika kebanyakan penduduknya berada dalam kemiskinan serta kesengsaraan, maka dari itu kemiskinan tidak sekedar hanya masalah tidak terpenuhinya kebutuhan dasar hidup masyarakat melainkan juga menjabarkan situasi pendidikan dan kesehatan yang tidak baik, penurunan di bidang ilmu pengetahuan dan komunikasi, ketidakmampuan menegakkan hak-hak asasi manusia dan politik, dan belum terdapatnya kehormatan, kepercayaan dan harga diri (Chamsyah, 2012).

Kemiskinan membuat seseorang belum bisa melengkapi keperluan dasar dirinya dan keluarganya yang mencakup kebutuhan fisik, mental dan sosial. Dengan tidak terpenuhinya kebutuhan dasar manusia akan berimplikasi pada keterlantaran anggota keluarga dan ketunaan sosial. Rumah merupakan salah satu keperluan dasar manusia yang tingkat kepentingannya lebih rendah dari sandang dan pangan. Dalam konteks penyelenggaraan perumahan yang terdesentralisasi, saat ini belum tersedia sistem penyediaan perumahan di daerah yang tanggap terhadap perkembangan kebutuhan. Hal ini disebabkan belum berkembangnya pemahaman bahwa perumahan juga merupakan urusan publik selain urusan individu (Bappenas, 2003).

Budihardjo (2009) mengemukakan bahwa salah satu permasalahan bidang perumahan dan permukiman di Indonesia adalah kecilnya tingkat pemenuhan kebutuhan perumahan yang layak dan terjangkau bagi masyarakat miskin. Hal ini disebabkan karena ketidakmampuan masyarakat miskin untuk mendapatkan rumah yang layak dan terjangkau serta lemahnya sistem dan mekanisme subsidi perumahan bagi kelompok masyarakat tidak mampu, baik melalui mekanisme pasar formal maupun informal.

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka peran pemerintah dalam menyediakan infrastruktur dan kebijakan yang tepat sasaran untuk berfungsinya sistem perumahan yang terjangkau harus dijalankan, serta untuk mereka yang sangat tidak mampu, pemerintah harus menyediakan subsidi. Ini adalah konsekuensi bila negara mengakui bahwa perumahan adalah sebuah kebutuhan dasar (Santoso, 2002).

Dari latar belakang tersebut, masalah dalam penelitian ini yaitu: (1) Bagaimanakah pandangan masyarakat penerima bantuan bedah rumah tentang keberadaan program ini? (2) Apakah ada peningkatan kualitas rumah masyarakat miskin sebelum dan sesudah menerima bantuan program bedah rumah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng? (3) Bagaimana kendala-kendala yang dihadapi Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng dalam pelaksanaan program bedah rumah? (4) Bagaimana upaya yang dilakukan untuk mengatasi kelemahan-kelemahan yang dihadapi dalam program bedah rumah di Kabupaten Buleleng?

KAJIAN PUSTAKA

Menurut Djojohadikusumo (1994) kemiskinan muncul sebagai akibat kesenjangan yang mengandung dimensi ekonomis sosiologis dan berdimensi ekonomi regional. Kemiskinan ini terjadi sebagai akibat adanya ketimpangan kekuatan yang sangat mencolok diantara golongan-golongan pelaku ekonomi, dimana pengusaha besar cenderung mengandalkan kekuatan sumberdayanya untuk merebut suatu kedudukan di pasar barang dan jasa. Selain dari dimensi ekonomi dan non ekonomi, kemiskinan juga dapat disebabkan oleh dimensi geografis, sebuah rumah tangga miskin diwilayah yang mendukung dapat memiliki kesempatan yang lebih besar untuk keluar dari kemiskinan, sementara rumah tangga miskin yang berada pada wilayah yang tidak mendukung, cenderung menjadi stagnan dan bahkan menjadi sangat miskin.

Indikator kemiskinan ada bermacam-macam, yaitu: konsumsi beras, tingkat pendapatan, pengeluaran rumah tangga, kebutuhan fisik minimum, kebutuhan dasar dan kriteria dari BPS..

Menurut Badan Pusat Statistik Provinsi Bali (2009) kriteria dalam menentukan keluarga/rumah tangga dikategorikan miskin apabila:

- 1) Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8 m² per orang.
- 2) Jenis lantai tempat tinggal dari tanah/bambu/kayu murahan.
- 3) Jenis dinding tempat tinggal dari bamboo/bersama-sama dengan rumah tangga lain

- 4) Tidak memiliki fasilitas buang air besar/bersama-sama dengan rumah tangga lain
- 5) Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik
- 6) Sumber air minum berasal dari sumur/mata air tidak terlindung/sungai/air hujan
- 7) Bahan bakar memasak sehari-hari adalah kayu bakar/arang/minyak tanah
- 8) Hanya mengkonsumsi daging/susu/ayam satu kali dalam seminggu
- 9) Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun
- 10) Hanya sanggup makan sebanyak satu/dua kali dalam sehari
- 11) Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas/poliklinik
- 12) Sumber penghasilan rumah tangga adalah petani dengan luas lahan 500 m², buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan dan pekerjaan lainnya dengan pendapatan di bawah Rp 600.000,00 per bulan.
- 13) Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga: tidak sekolah/tidak tamat SD/hanya SD.
- 14) Tidak memiliki tabungan/barang yang mudah dijual dengan nilai minimal Rp 500.000,00 seperti sepeda motor (non-kredit), emas, ternak, kapal motor, atau barang modal lainnya.

Rumah adalah tempat perlindungan utama bagi manusia dari iklim, kemudian juga dari gangguan fisik lainnya. Rumah merupakan suatu basis pemeliharaan kemampuan produksi, tempat beristirahat, tempat untuk memelihara kesehatan, juga tempat untuk belajar dan mempersiapkan diri (Santoso, 2002:39).

Berdasarkan keputusan Gubernur Bali Nomor 400/03-G/HK/2012 tentang keluarga fakir miskin penerima bantuan bangunan rumah melalui kegiatan bedah rumah Provinsi Bali menyatakan bahwa dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat yang masih tergolong miskin perlu memberikan Bantuan Bangunan Rumah melalui kegiatan Bedah Rumah sebanyak 1.550 unit di 9 (sembilan) Kabupaten/Kota.

Kriteria penerimaan bantuan bedah rumah adalah:

- 1) Mempunyai KTP/identitas diri yang berlaku.
- 2) Terdaftar sebagai KK miskin yang ditetapkan oleh BPS.
- 3) Kepala Keluarga/anggota keluarga memperoleh upah penghasilan dibawah UMR
- 4) Kehidupan sehari-hari masih memerlukan bantuan untuk menghidupi keluarganya.
- 5) Mempunyai tempat tinggal diatas tanah punya pribadi yang dibuktikan dengan sertifikat
- 6) Tempat tinggal yang dimiliki dan ditempati adalah rumah tidak layak huni yang belum memenuhi syarat kesehatan, keamanan dan sosial.

Hipotesis

Kualitas rumah yang layak huni bagi masyarakat, dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan indikator: kebersihan, ventilasi, luas bangunan, kualitas bahan, kerapian dan kelengkapan ruangan. Sehingga hipotesis yang dapat diajukan adalah: Ada peningkatan kualitas rumah masyarakat miskin sebelum dan

sesudah menerima bantuan program bedah rumah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng secara signifikan.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini sebagai populasi terjangkau adalah jumlah masyarakat yang memperoleh bantuan bedah rumah di Kabupaten Buleleng pada tahun 2013. Berdasarkan SK Bedah Rumah Provinsi Bali tahun 2013 tercatat sebanyak 1.765 unit rumah yang sudah memperoleh bantuan program bedah rumah di Kabupaten Buleleng.

Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan penarikan sampel acak berstrata dengan metode proportionate Stratified Random Sampling, dimana pengambilan sampelnya ditentukan berstrata berdasarkan kecamatan dan setelah ditentukan jumlah masing-masing kecamatan pengambilan sampel dilakukan secara acak.

Instrumen penelitian ini adalah kuesioner dengan skala likert. Sebelum kuesioner digunakan, terlebih dahulu dilakukan uji validitas dan uji reliabilitas. Berdasarkan hasil uji validitas dan reliabilitas dari total 30 pernyataan yang diajukan, semua pernyataan yang diajukan dapat dilakukan penelitian. Teknik analisis data dalam penelitian dengan menggunakan analisis deskriptif. Selanjutnya dilakukan uji beda rata-rata berpasangan dengan uji Wilcoxon $\text{sig}/2 < 0,05$.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Sebelum dianalisis lebih jauh, dilakukan uji validitas dan reliabilitas terlebih dahulu. Diperoleh hasil bahwa koefisien korelasi setiap pernyataan lebih besar dari 0,3 sehingga semua butir pernyataan dalam kuesioner tersebut *valid*. Cronbach's Alpha masing-masing variabel lebih besar dari 0,6 sehingga alat ukur dalam penelitian ini adalah reliabel (andal).

Berdasarkan Tabel 1, dapat diartikan bahwa responden dalam penelitian ini menilai kebersihan, ventilasi, luas bangunan, kualitas bahan, kerapian, dan kelengkapan ruangan setelah adanya program bedah rumah adalah baik

Tabel 1
Hasil Analisis Deskriptif

Variabel	N	Min	Max	Mean	Std. Deviation
Kualitas Rumah sebelum Program Bedah Rumah	95	1.00	3.00	1.8737	0.46108
Kualitas Rumah setelah Program Bedah Rumah	95	1.50	4.50	3.1737	0.75007
Valid N (listwise)	95				

Sumber : Data Primer Diolah

Pembahasan

Pandangan Masyarakat Penerima Bantuan terhadap Keberadaan Program Bedah Rumah

Sebesar 75,79 persen responden menyatakan program bedah rumah di Kabupaten Buleleng adalah positif dari sisi jumlah dana bantuan, yakni jumlah dana bantuan telah sesuai dengan yang telah dibudgetkan dalam APBD dan bersifat transparan. Sebesar 71,58 persen responden menyatakan program bedah

rumah di Kabupaten Buleleng adalah positif dari sisi prosedur pengusulan, yakni prosedur pengusulan telah disosialisasikan dengan baik oleh dinas terkait dan tata cara pengusulan tidak berbelit-belit. Sebesar 88,42 persen responden menyatakan program bedah rumah di Kabupaten Buleleng adalah positif dari sisi proses pencairan dana, yakni proses pencairan dana sangat mudah, bertahap dan waktunya relatif cepat.

Sebesar 84,21 persen responden menyatakan program bedah rumah di Kabupaten Buleleng adalah positif dari sisi penggunaan dana, yakni dana bantuan disalurkan langsung kepada warga penerima bantuan yang sudah dicatatkan dan diberikan bertahap sesuai dengan termin. Responden yang menyatakan program bedah rumah di Kabupaten Buleleng adalah netral rata-rata sebesar 8,16 persen dan yang menyatakan negatif rata-rata sebesar 11,84 persen.

Peningkatan Kualitas Rumah Masyarakat Miskin Sebelum dan Sesudah Menerima Bantuan Program Bedah Rumah

Berdasarkan hasil pengolahan data dengan program SPSS yang telah dilakukan, untuk indikator kebersihan diperoleh bahwa sebanyak 4 KK menyatakan kebersihan setelah program sama dengan kebersihan sebelum program, dan sebanyak 91 KK menyatakan kebersihan setelah program lebih besar daripada kebersihan sebelum program. Nilai signifikansi *p-value* kurang dari 0,05, yaitu 0,000 yang memiliki arti bahwa H_0 ditolak. Ini berarti bahwa terdapat peningkatan indikator kebersihan setelah menerima bantuan bedah rumah dibandingkan dengan sebelum menerima bantuan bedah rumah.

Berdasarkan uji Wilcoxon dilihat dari indikator ventilasi diperoleh hasil bahwa sebanyak 2 KK menyatakan ventilasi setelah program lebih kecil daripada ventilasi sebelum program, sebanyak 82 KK menyatakan ventilasi setelah program lebih besar daripada ventilasi sebelum program, dan sebanyak 11 KK menyatakan ventilasi setelah program sama dengan ventilasi sebelum program. Hal ini berarti bahwa ada beberapa masyarakat yang menerima bantuan bedah rumah mendapatkan hasil yang tidak sesuai dengan yang diharapkan. Nilai signifikansi *p-value* kurang dari 0,05, yaitu 0,000 yang memiliki arti bahwa H_0 ditolak. Ini berarti bahwa terdapat peningkatan indikator ventilasi setelah menerima bantuan bedah rumah dibandingkan dengan sebelum menerima bantuan bedah rumah.

Hasil penelitian untuk indikator luas bangunan diperoleh bahwa sebanyak 92 KK menyatakan luas bangunan setelah program lebih besar daripada luas bangunan sebelum program, dan sebanyak 3 KK menyatakan luas bangunan setelah program sama dengan luas bangunan sebelum program. Hal ini berarti bahwa ada 3 KK yang mendapatkan hasil yang sama dengan sebelum mendapatkan bantuan bedah rumah. Nilai signifikansi *p-value* kurang dari 0,05, yaitu 0,000 artinya H_0 ditolak. Ini berarti bahwa terdapat peningkatan indikator luas bangunan setelah menerima bantuan bedah rumah dibandingkan dengan sebelum menerima bantuan bedah rumah.

Untuk indikator kualitas bahan diperoleh bahwa sebanyak 6 KK menyatakan kualitas bahan setelah program lebih kecil daripada kualitas bahan sebelum program, sebanyak 77 KK menyatakan kualitas bahan setelah program

lebih besar daripada kualitas bahan sebelum program, dan sebanyak 12 KK menyatakan kualitas bahan setelah program sama dengan kualitas bahan sebelum program. Hal ini berarti bahwa ada beberapa masyarakat yang menganggap kualitas bahan yang digunakan untuk pembangunan bedah rumah tersebut lebih rendah dari kualitas bahan rumah mereka sebelumnya. Meskipun demikian, nilai signifikansi *p-value* kurang dari 0,05, yaitu 0,000 yang artinya H_0 ditolak. Ini berarti bahwa terdapat peningkatan indikator kualitas bahan setelah menerima bantuan bedah rumah dibandingkan dengan sebelum menerima bantuan bedah rumah.

Hasil penelitian untuk indikator kerapian diperoleh bahwa sebanyak 94 KK menyatakan kerapian bangunan setelah program lebih besar daripada kerapian bangunan sebelum program, dan sebanyak 1 KK menyatakan kerapian bangunan setelah program sama dengan kerapian bangunan sebelum program. Hal ini berarti bahwa ada 1 KK yang mendapatkan hasil yang sama dengan sebelum mendapatkan bantuan bedah rumah. Nilai signifikansi *p-value* kurang dari 0,05, yaitu 0,000 artinya H_0 ditolak. Ini berarti bahwa terdapat peningkatan indikator kerapian bangunan setelah menerima bantuan bedah rumah dibandingkan dengan sebelum menerima bantuan bedah rumah. Untuk indikator kelengkapan ruangan diperoleh bahwa sebanyak 92 KK menyatakan kelengkapan ruangan setelah program lebih besar daripada kelengkapan ruangan sebelum program, dan sebanyak 3 KK menyatakan kelengkapan ruangan setelah program sama dengan kelengkapan ruangan sebelum program. Hal ini berarti bahwa sebagian kecil masyarakat yang menerima bantuan bedah rumah ada yang mendapatkan hasil

yang sama dengan sebelum mendapatkan bantuan bedah rumah. Nilai signifikansi *p-value* kurang dari 0,05, yaitu 0,000 yang memiliki arti bahwa H_0 ditolak. Ini berarti bahwa terdapat peningkatan indikator kelengkapan ruangan setelah menerima bantuan bedah rumah dibandingkan dengan sebelum menerima bantuan bedah rumah.

Berdasarkan hasil pengolahan data dengan program SPSS, didapatkan hasil bahwa secara keseluruhan sebanyak 4 KK menyatakan kualitas rumah masyarakat miskin setelah program lebih kecil daripada kualitas rumah masyarakat miskin sebelum program, hanya sebanyak 86 KK menyatakan kualitas rumah masyarakat miskin setelah program lebih besar daripada kualitas rumah masyarakat miskin sebelum program, dan sebanyak 5 KK menyatakan kualitas rumah masyarakat miskin setelah program sama dengan kualitas rumah masyarakat miskin sebelum program. Nilai signifikansi *p-value* kurang dari 0,05, yaitu 0,000 yang artinya bahwa H_0 ditolak.

Ini berarti bahwa terdapat peningkatan kualitas rumah masyarakat miskin setelah menerima bantuan bedah rumah dibandingkan dengan sebelum menerima bantuan bedah rumah. Hal ini berarti bahwa program bedah rumah telah memberikan manfaat yang signifikan dalam meningkatkan kualitas rumah masyarakat miskin. Dengan kata lain, Pemerintah telah melaksanakan program sesuai dengan tujuan program pengembangan kabupaten dan kecamatan dalam penanggulangan kemiskinan yaitu meningkatkan kualitas perumahan yang layak huni bagi keluarga miskin yang telah menerima bantuan bedah rumah.

Kendala-kendala yang Dihadapi Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng dalam Pelaksanaan Program Bedah Rumah

kendala-kendala yang dihadapi Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng dalam pelaksanaan program bedah rumah adalah:

1) Verifikasi

Pendapat responden tentang verifikasi administrasi telah berjalan sesuai dengan prosedur, namun dalam verifikasi lapangan terjadi perbedaan dimana data yang di input dalam berkas ternyata memiliki banyak perbedaan, seperti; klasifikasi calon penerima bantuan yang tidak sesuai standar kriteria yang ditetapkan, manipulasi data calon penerima bantuan yang ternyata memiliki keterkaitan hubungan kekerabatan dengan petugas yang melakukan pendataan, dan calon penerima bantuan yang ternyata memberikan kompensasi dalam bentuk nominal atau material agar dapat dimasukkan ke dalam daftar penerima bantuan.

2) Penjajagan

Pendapat responden tentang penjajagan telah berjalan baik, namun kendalanya adalah kadang kala adanya data yang tidak sesuai dengan data administrasi dengan lokasi, seperti misalnya salah satu calon terdata sebagai masyarakat miskin namun setelah dilakukan penjajagan ternyata rumah tersebut tidak termasuk kriteria rumah yang tidak layak huni, sehingga menyebabkan harus adanya verifikasi ulang terhadap data administrasi masyarakat miskin dengan calon lokasi agar tidak lagi terjadi salah sasaran.

3) Sosialisasi

Pendapat responden tentang sosialisasi sudah berjalan dengan baik, namun kondisinya untuk di daerah yang jauh dari kota terkadang jauh dari informasi dan sosialisasi sehingga masih banyak masyarakat miskin yang tidak memahami tujuan sebenarnya dari program bedah rumah. Banyak masyarakat yang mendaftarkan diri sebagai golongan masyarakat miskin hanya untuk mendapatkan bedah rumah secara gratis, sementara masyarakat miskin yang benar-benar termasuk golongan miskin malah tidak terdaftar sebagai masyarakat miskin. Sehingga data yang diperoleh dari Dinas Sosial tidak benar-benar akurat.

4) Pembangunan

Pendapat responden tentang pembangunan juga telah berjalan baik, namun yang menjadi kendala adalah lambatnya dana yang masuk ke rekening menyebabkan pelaksanaan pembangunan molor dari waktu yang telah ditentukan. Tenaga kerja yang terlibat dalam proses pembangunan juga menjadi kendala, yaitu kurangnya tenaga kerja yang akan digunakan sehingga ketentuan selambat-lambatnya 30 hari menjadi tidak tepat waktu.

Upaya yang Dilakukan untuk Mengatasi Kelemahan-kelemahan yang Dihadapi dalam Program Bedah Rumah di Kabupaten Buleleng

Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi kelemahan-kelemahan yang dihadapi Pemerintah dalam pelaksanaan program bedah rumah di Kabupaten Buleleng adalah:

- 1) Diperlukan adanya dukungan Pemerintah Kabupaten Buleleng yang dapat terlibat langsung pada tahap pencahangan dan pemantauan. Pada pelaksanaan

kegiatan, hendaknya Dinas Sosial dan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Buleleng mereka membentuk tim kerja untuk saling membantu.

- 2) Untuk membantu kelancaran dalam pelaksanaan program bedah rumah, di tingkat kabupaten dan di setiap kecamatan seharusnya disiapkan konsultan pendamping dari unsur swasta dan pemerintah.
- 3) Pelaku utama dalam program bedah rumah ini sebaiknya adalah masyarakat desa/kelurahan yang ada di sekitar penerima program yang dalam melaksanakan kegiatannya difasilitasi oleh tim pelaksana/Timlak bedah rumah. Hal ini bertujuan agar setiap pelaksanaannya langsung dapat diawasi oleh masyarakat sehingga tidak adanya rasa ketidakpuasan setelah proses pembangunan selesai dilaksanakan.
- 4) Swadaya masyarakat diutamakan bersumber dari masyarakat mampu di seputar penerima program, agar mendorong dukungan dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemugaran rumah keluarga miskin.
- 5) Agar pelaksanaan program bedah rumah tidak terjadi penyimpangan dari tujuan dasar adalah perlu disusun standar baku dari calon penerima bantuan sehingga program ini tepat sasaran.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

- 1) Persepsi masyarakat miskin penerima bantuan terhadap keberadaan program bedah rumah sebagian besar memberikan pernyataan positif (Setuju dan

Sangat Setuju), sisanya memberikan pernyataan netral, dan pernyataan negatif (Sangat Tidak Setuju dan Tidak Setuju).

- 2) Terdapat peningkatan kualitas rumah masyarakat miskin setelah menerima bantuan bedah rumah dibandingkan dengan sebelum menerima bantuan bedah rumah dilihat dari indikator kebersihan, ventilasi, luas bangunan, kualitas bahan, kerapian, dan kelengkapan ruangan, atau dengan kata lain dana bantuan sosial melalui program bedah rumah berperan signifikan terhadap peningkatan kualitas rumah masyarakat miskin.
- 3) Kendala-kendala yang ditemukan Pemerintah dalam menjalankan program bedah rumah di Kabupaten Buleleng ditinjau dari segi verifikasi, penjajagan, sosialisasi, dan pembangunan.
- 4) Upaya-upaya untuk mengatasi kelemahan-kelemahan tersebut diantaranya adalah: menyiapkan konsultan pendamping, menyerahkan pelaku utama dalam program bedah rumah kepada masyarakat desa/kelurahan, dan perlu disusun standar baku dari calon penerima bantuan.

Saran

- 1) Berdasarkan analisis program bantuan bedah rumah, yang berkaitan dengan ketepatan sasaran bantuan masih harus benar-benar diseleksi untuk masyarakat yang masuk dalam katagori miskin. Katagori miskin yang dilaporkan petugas tidak sesuai dengan kenyataan yang terjadi dimasyarakat. Berkaitan dengan hal tersebut diperlukan petugas independen yang mengawasi proses seleksi penerima bantuan.
- 2) Berkaitan dengan pengawasan pemerintah, diperlukan suatu laporan evaluasi pemakaian bantuan dari masyarakat miskin kepada petugas. Laporan evaluasi yang dibuat dikaitkan dengan sudah seberapa jauh pemanfaatan dan realisasi bantuan tersebut. Sehingga dengan adanya laporan evaluasi tersebut

pemanfaatan bantuan menjadi terkontrol. Laporan evaluasi bisa dibuat sesuai kebutuhan dan besar bantuan yang diterimanya.

- 3) Dengan penelitian ini, diharapkan salah satunya agar dapat membantu Pemerintah Daerah Provinsi Bali dan Pemerintah Kab/Kota dalam rangka penanggulangan kemiskinan di wilayah Bali, dan apabila hasil penelitian ini kurang sempurna maka perlu penelitian lebih lanjut dengan menggunakan variabel-variabel lain sehingga penelitian tentang program Bedah Rumah dapat lebih sempurna.

REFERENSI

- Arsyad, Lincolin. 1997. *Ekonomi Pembangunan*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi. YKPN. Yogyakarta.
- Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Bali. 2008. *Data Rumah Tangga Sasaran Kabupaten Badung*. Denpasar.
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 2003. *Infrastruktur Indonesia; Sebelum, Selama dan Pasca Krisis*. Jakarta: Perum Percetakan Negara RI.
- Badan Pusat Statistik Indonesia. 2003. *Survei Demografi Dan Kesehatan Indonesia 2002-2003*. Kerjasama antara BPS, BKKBN, Depkes, dan ORC Macro, Calverton, Maryland USA, Desember 2003.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Bali. 2009. *Sekretariat Komite Penanggulangan Kemiskinan Republik Indonesia*. Denpasar.
- Bastian, Indra. 2008. *Akuntansi Kesehatan*. Edisi 1. Cetakan Pertama. Penerbit Erlangga: Jakarta.
- Baswir, Revrison. 1997. *Agenda Ekonomi Kerakyatan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bisnis Bali. 2012. *Jaminan Kesehatan: JKBM Terhambat Administrasi*. *Artikel*, <http://bali-bisnis.com>

- Budihardjo, Eko (ed). 2009. *Perumahan dan Permukiman di Indonesia*. Bandung: Penerbit Alumni.
- Carolina, Anita and Loesida, Roeliana and Suratman, Suratman. 2014. Analisis Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Program Bedah Rumah di Kelurahan Kandang Kecamatan Kampung Melayu. *Masters Thesis*. Universitas Bengkulu.
- Chamsyah, Bachtiar. 2012. Kemiskinan Sebagai Isu Global. *Artikel*. <http://www.socialwelfare.fisip.ui.ac.id>
- Dharmadi. 2009. Partisipasi Masyarakat Pada Pelayanan Kesehatan Terstruktur dan Paripurna, *Jurnal Vol 5 : 1907-3275*.
- Dinas Sosial Provinsi Bali. 2011. Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Bedah Rumah. *Juknis*. <http://www.disos.baliprov.go.id>
- Djojohadikusumo, Sumitro. 1994. *Perspektif Perekonomian Indonesia Jangka Panjang*. LPFE.UI, Jakarta.
- Hadi. (2002). *Status Gizi Dalam Masyarakat*. Jakarta: Aksara Baru.
- Handayani, dkk . 2008. Evaluasi Program Pemberian Makanan Tambahan Anak Balita, *Jurnal Vol 11 : 21 – 26*.
- Herlianto. 1986. *Urbanisasi dan Pembangunan Kota*. Alumni. Bandung.
- Kurniasih, Sri. 2006. Usaha Perbaikan Pemukiman Kumuh di Petukangan Utara-Jakarta Selatan. *Jurnal Teknik*. Teknik Arsitektur Universitas Budi Luhur.
- Metrobali. 2012. JKBM Makin Eksis, Dua Tahun Layani Lebih dari 5 Juta Pasien. *Artikel*, Media Inspirasi Krama Bali. www.metrobali.com
- Mikkelsel, Britha. 2010. *Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya-Upaya Pemberdayaan: Sebuah Pegangan bagi Praktisi Lapangan (Mathios Naile: penterjemah)*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Muka, I Wayan. 2011. Kembalikan Program Bedah Rumah ke Tujuan Dasar. *Artikel*. BP Opini. Denpasar.
- Nasution, S. 2000. *Penelitian Ilmiah*, Jakarta: Penerbit Bumi Aksara.
- Nunes, Celso. 2007. The Evolution of the Economic Thought on Poverty Measurement. *Northeast Business and Economics Association*. Madeira University DGE – Universidade da Madeira Caminho da Penteada 9020-105 Funchal Portugal.

- Panudju, Bambang. 1999. *Pengadaan Perumahan Kota dengan Peran Serta Masyarakat Berpenghasilan Rendah*. Bandung: Penerbit Alumni.
- Ridho, Muhammad. 2001. *Kemiskinan di Perkotaan*. Semarang: Penerbit Unissula.
- Santoso, Jo et al. 2002. *Sistem Perumahan Sosial di Indonesia*. Jakarta: Pusat Studi Perkotaan UI dan Ikatan Ahli Perencanaan.
- Suara Pembaruan. 2012. Orang Miskin di Denpasar Sebanyak 2.586 KK. Minggu, 18 Maret 2012. <http://www.suarapembaruan.com>
- Sukirno, Sadono. 2000. *Ekonomi Pembangunan Proses, Masalah dan Dasar Kebijakan Pembangunan*. UI-Press. Jakarta.
- Supriasa. 2001. *Gizi dalam Masyarakat*. Jakarta: PT. Elex Media.
- Suradi. 2012. Studi Evaluasi Dampak Kebijakan Sosial: Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni bagi Keluarga Miskin di Kota Banjarmasin. *Sosiokonsepsia*, Vol. 17, No. 02/2012. Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial RI.
- Sutrisno, Aidin and Putra, Novi Hendrika Jaya and Gumay, Syuplahan. 2014. Problematika Program Bedah Rumah Bagi Masyarakat Penerima Bantuan (Studi Kasus pada Penerima Program Bedah Rumah di Kelurahan Pematang Gubernur Kota Bengkulu). *Undergraduated Thesis*. Universitas Bengkulu.
- Suyana Utama, Made. 2009. *Analisis Kuantitatif: Buku Ajar*. Denpasar. Penerbit Sastra Utama.
- UNESCAP dan UN-HABITAT. 2009. *Perumahan Bagi Kaum Miskin di Kota-Kota Asia; Pembiayaan Perumahan*. Vol. V. Terjemahan Wicaksono Sarosa et al. Penerbit UNESCAP dan UNHABITAT.
- Utama. 2010. Penanggulangan Kemiskinan melalui Pemberdayaan Masyarakat di Provinsi Bali. *Orasi Ilmiah Guru Besar Fakultas Ekonomi Univeristas Udayana*. Denpasar.
- Wahyu, Fransiska. 2011. Upaya Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat Miskin di Rusunawa Pekunden Kota Semarang. *Skripsi*. Jurusan Antropologi dan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang.